ANALISIS YURIDIS DAN DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM MILITER INDONESIA

Fachur Rahman *¹
Irwan Triadi ²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

*e-mail: 2310611074@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, irwantriadi1@yahoo.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer serta faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dalam perspektif hukum militer Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada peran strategis peradilan militer dalam menjaga kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), di mana anggota militer tunduk tidak hanya pada hukum pidana umum, tetapi juga pada hukum pidana militer yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan terkait. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana militer terbagi menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana militer murni (misalnya desersi, insubordinasi, meninggalkan pos) dan tindak pidana militer campuran (tindak pidana umum yang dilakukan anggota militer dan diadili di peradilan militer). Unsur-unsur tindak pidana militer murni antara lain: subyek pelaku adalah anggota militer aktif, perbuatan meninggalkan tugas tanpa izin, serta adanya niat atau kesengajaan tidak kembali. Sementara itu, tindak pidana militer campuran tetap harus memenuhi unsur tindak pidana umum, tetapi dengan konteks dan mekanisme peradilan militer. Penegakan hukum militer dipengaruhi oleh faktor substantif, struktural, dan kultural, seperti sosialisasi hukum, profesionalitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta budaya hukum di lingkungan militer. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa identifikasi unsur-unsur tindak pidana militer sangat penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil dan efektif. Reformasi peradilan militer, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta keseimbangan antara penegakan disiplin dan perlindungan hak asasi anggota militer menjadi kunci terciptanya sistem hukum militer yang transparan dan profesional di Indonesia.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Peradilan Militer, Subyek Militer, Tindak Pidana Militer.

Abstract

This study aims to analyze the elements of criminal acts committed by military subjects and the factors that influence law enforcement from the perspective of Indonesian military law. The background of this study is based on the strategic role of military justice in maintaining discipline and order in the Indonesian National Army (TNI), where military members are subject not only to general criminal law, but also to military criminal law specifically regulated in the Military Criminal Code (KUHPM) and related regulations. The study uses a normative juridical method with a literature study approach, analyzing laws and regulations, doctrines, and primary and secondary legal literature. The results of the study show that military crimes are divided into two categories, namely pure military crimes (eg desertion, insubordination, leaving the post) and mixed military crimes (general crimes committed by military members and tried in military courts). The elements of pure military crimes include: the perpetrator is an active military member, the act of leaving duty without permission, and the intention or deliberate failure to return. Meanwhile, mixed military crimes must still fulfill the elements of general crimes, but with the context and mechanism of military justice. Military law enforcement is influenced by substantive, structural, and cultural factors, such as legal socialization, professionalism of law enforcement officers, availability of facilities and infrastructure, and legal culture in the military environment. The conclusion of this study confirms that identifying elements of military crimes is very important to ensure that law enforcement is fair and effective. Military justice reform, increasing the capacity of law enforcement officers, and balancing between enforcing discipline and protecting the human rights of military members are the keys to creating a transparent and professional military legal system in Indonesia.

Keywords: Penegakan Hukum, Peradilan Militer, Subyek Militer, Tindak Pidana Militer.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peradilan militer di Indonesia memiliki peranan penting dalam menjaga kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai subyek hukum khusus, anggota militer tidak hanya tunduk pada hukum pidana umum, tetapi juga pada hukum pidana militer yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan proses penegakan hukum dengan karakteristik tugas dan fungsi militer yang berbeda dengan masyarakat sipil.¹ Dalam praktiknya, anggota militer dapat melakukan tindak pidana yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni adalah pelanggaran yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer, seperti desersi, insubordinasi, dan meninggalkan pos penjagaan. Sedangkan tindak pidana militer campuran merupakan tindak pidana umum yang apabila dilakukan oleh anggota militer, diadili oleh peradilan militer dengan ketentuan khusus.² Oleh karena itu, identifikasi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer sangat penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif dan adil.

Selain aspek yuridis, penegakan hukum di lingkungan militer juga dipengaruhi oleh faktor-faktor khusus seperti hierarki militer, kewajiban ketaatan terhadap perintah, serta dinamika hubungan antara subyek militer dengan sistem peradilan militer. Faktor-faktor ini berimplikasi pada proses penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan militer yang berbeda dengan peradilan umum.³ Misalnya, dalam kasus desersi, unsur-unsur tindak pidana harus dianalisis secara cermat agar dapat membedakan pelanggaran disiplin biasa dengan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana militer. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer serta faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dalam perspektif hukum militer di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas mekanisme hukum militer dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana, sehingga tercipta keadilan dan kedisiplinan yang optimal dalam lingkungan TNI.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

¹ Haris, O. K., & Hidayat, S, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi dengan Tindakan Nyata dalam Peradilan Militer." *Legal*, 2019.

² Swandana, M. Dastin Meta. "Kewenangan Peradilan Militer terhadap Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 15 No. 2, Juli 2024, hal. 45.

³ *Hukum Peradilan Militer*, repository.lppm.unila.ac.id, 2020, hal. 30.

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer berdasarkan ketentuan hukum militer dan putusan pengadilan militer?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perspektif hukum militer?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian hukum secara teoritis dan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan terkait unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer dan penegakan hukum dalam perspektif hukum militer. Metode ini dipilih karena penelitian berorientasi pada studi kepustakaan (*library research*) dan tidak melakukan pengumpulan data primer secara langsung di lapangan.⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum militer juga dianalisis untuk memperkuat kajian hukum.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi literatur dari berbagai sumber hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis yuridis normatif, yaitu menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dan mengkaji kesesuaiannya dengan praktik penegakan hukum di lingkungan militer. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai unsur-unsur tindak pidana militer dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum militer.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Unsur-Unsur Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Subyek Militer

Penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana yang dilakukan oleh warga sipil. Dalam konteks hukum militer di Indonesia, tindak pidana militer terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni hanya dapat dilakukan oleh anggota militer dan berkaitan langsung dengan

⁴ Diki Zukriadi, S. H., & MH, M. K. (2023). Praktik Pemilu di Beberapa. *Penegakan Hukum Pemilu*, 27.

⁵ Ismail, I., & Maysarah, A. (2025). TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA MILITER. *Warta Dharmawangsa*,

pelaksanaan tugas dan kedisiplinan militer, seperti desersi, insubordinasi, dan meninggalkan pos penjagaan. Sedangkan tindak pidana militer campuran adalah tindak pidana umum yang apabila dilakukan oleh anggota militer, maka diadili oleh peradilan militer dengan ketentuan hukum yang berlaku khusus bagi militer.⁶

Unsur-unsur tindak pidana militer murni, misalnya pada kasus desersi, meliputi: (a) subyek pelaku adalah anggota militer aktif; (b) perbuatan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin; dan (c) adanya niat atau kesengajaan untuk tidak kembali melaksanakan tugas. Dalam praktik peradilan militer, unsur-unsur ini harus dibuktikan secara menyeluruh agar putusan pengadilan dapat memberikan efek jera sekaligus menjaga kedisiplinan militer.⁷ Selain itu, unsur-unsur tindak pidana militer campuran juga harus memenuhi kriteria umum tindak pidana, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kesengajaan atau kelalaian, dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Namun, yang membedakan adalah konteks pelaku yang merupakan anggota militer dan proses peradilannya yang dilakukan di lingkungan peradilan militer. Misalnya, dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap warga sipil, unsur kesengajaan, perbuatan melawan hukum, dan akibat luka harus dibuktikan, dan proses hukumnya mengikuti prosedur peradilan militer.⁸

Identifikasi unsur-unsur tersebut menjadi penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif dan adil, serta menjaga keseimbangan antara penegakan disiplin militer dan perlindungan hak asasi anggota militer.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Militer

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat substantif, struktural, dan kultural. Berdasarkan analisis Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, penegakan hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya hukum.⁹

1. Faktor Hukum

Sosialisasi hukum yang rutin dan pemahaman yang baik terhadap hukum disiplin militer dan pidana militer sangat diperlukan agar anggota militer mengetahui batasan-batasan hukum yang

⁶ Yudha Wira Pratama, Budi Gutami, Nabitus Saaadah, "Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Di Lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsha Jaya," *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3 Tahun 2016, hlm. 14.

⁷ Ziyad Ilham, Nursiti, "Tindak Pidana Menentang Atasan dengan Kekerasan (Insubordinasi) yang Dilakukan oleh Anggota TNI," *Jurnal Hukum Militer*, Mei 2022.

⁸ Baharuddin Badaru, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Umum Bagi Prajurit TNI Di Lingkungan Peradilan Militer," *Journal of Lex Generalis*, 2021.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

berlaku. Ketidaktahuan atau ketidakjelasan aturan dapat menghambat penegakan hukum yang efektif.

2. Faktor Penegakan Hukum

Peran petugas penegak hukum sangat krusial. Penegak hukum yang tegas, profesional, dan bijaksana dalam menangani kasus pelanggaran anggota militer akan memperkuat efektivitas penegakan hukum. Sebaliknya, ketidakprofesionalan atau keberpihakan dapat melemahkan kepercayaan dan efektivitas sistem peradilan militer.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai, seperti tenaga ahli hukum militer yang kompeten dan infrastruktur peradilan yang lengkap, menjadi penunjang utama kelancaran proses hukum di lingkungan militer.¹⁰

4. Faktor Masyarakat dan Budaya Hukum

Masyarakat, termasuk lingkungan militer sendiri, memiliki peran dalam memberikan informasi dan mendukung penegakan hukum. Budaya hukum yang kuat di lingkungan militer akan menumbuhkan kesadaran hukum dan kedisiplinan yang tinggi di kalangan anggota militer.

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun terdapat beberapa disharmoni antara Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, penegakan hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer di lingkungan peradilan militer tetap berjalan efektif. Hal ini didukung oleh aspek substantif hukum yang jelas, struktur hukum yang terorganisir, serta budaya hukum yang mendukung di lingkungan militer.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana militer memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana sipil. Tindak pidana militer terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu tindak pidana militer murni yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer dan berkaitan langsung dengan tugas kemiliteran, serta tindak pidana militer campuran yang merupakan tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer namun diadili dalam peradilan militer. Identifikasi unsur-unsur tindak pidana ini sangat penting untuk memastikan proses penegakan hukum yang tepat, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum militer serta menjaga kedisiplinan dalam lingkungan militer.

¹⁰ Kurniawati, Adwani & Mujibussalim, "Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Mengadili Prajurit TNI," *Jurnal Hukum*, 2018.

Unsur-unsur tindak pidana militer, seperti pada kasus desersi dan insubordinasi, harus dapat dibuktikan secara menyeluruh, mencakup subyek pelaku, perbuatan yang dilakukan, dan kesengajaan atau niat pelaku. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut telah berjalan dengan mekanisme khusus di peradilan militer yang berbeda dengan peradilan umum, sehingga memerlukan pemahaman mendalam mengenai norma hukum dan karakteristik militer. Selain itu, penegakan hukum dalam lingkungan militer dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek hukum, peran aparat penegak hukum militer, sarana dan prasarana pendukung, serta budaya hukum di kalangan anggota militer. Hambatan-hambatan seperti intervensi atasan militer, ketidakjelasan kewenangan, dan kurangnya independensi peradilan militer masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan keadilan yang optimal dalam sistem peradilan militer. Oleh karena itu, reformasi peradilan militer, termasuk revisi undang-undang terkait dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sangat diperlukan guna memperkuat efektivitas dan transparansi penegakan hukum militer.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya keseimbangan antara penegakan disiplin militer dan perlindungan hak asasi anggota militer agar tercipta sistem hukum militer yang adil, transparan, dan berkeadaban, yang pada akhirnya mendukung terciptanya kedisiplinan dan profesionalisme dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badaru, B. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Umum Bagi Prajurit TNI Di Lingkungan Peradilan Militer. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(9), 2461-2477.
- Diki Zukriadi, S. H., & MH, M. K. (2023). Praktik Pemilu di Beberapa. *Penegakan Hukum Pemilu*, 27.
- Haris, O. K., & Hidayat, S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Nyata Dalam Peradilan Militer. *Halu Oleo Legal Research*, 1(1), 99-110.
- Hukum Peradilan Militer, repository.lppm.unila.ac.id, 2020.
- Ilham, Z., & Nursiti, N. (2022). TINDAK PIDANA MENENTANG ATASAN DENGAN KEKERASAN (INSUBORDINASI) YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 6(2), 150-157.
- Ismail, I., & Maysarah, A. (2025). TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA MILITER. *Warta Dharmawangsa*, 19(1), 466-477.
- Kurniawati, Adwani & Mujibussalim. (2018). "Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Mengadili Prajurit TNI," *Jurnal Hukum*.

Pratama, Y. W., Gutami, B., & Saadah, N. (2016). Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer di Lingkungan Komando Resort Militer 081/dhirotsaha Jaya. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-17.

Soekanto, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Swandana, M. D. M. (2024). KEWENANGAN PERADILAN MILITER TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PADA PERKARA KONEKSITAS YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI). *JURNAL HUKUM MILITER*, 17(2), 1-21.